

Megawati
Institute



**STRATEGI MENDORONG
PERTUMBUHAN EKONOMI
TUJUH PERSEN**

SUMMARY

Apabila kita mengedepankan pemerataan maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi ($\geq 7\%$)

Melibatkan UMKM dalam aktivitas investasi dan ekspor

Melarang masuknya perusahaan besar untuk sektor usaha – sektor usaha yang layak untuk di garap UMKM

Membuat UU promosi sub-kontrak (Sub-Contracting Promotion Act) untuk mencegah praktik penyimpangan yang dilakukan perusahaan besar seperti menunda atau mengurangi pembayaran atas kerjasama yang dilakukan dengan UMKM



Pemerataan melalui peningkatan peran UMKM yang berkooperasi dengan usaha besar

Diperlukan insentif fiskal: usaha tidak kena pajak (UMKM) sampai dengan omset Rp1,1 Miliar (tarif 0%) dari yang selama ini tarif 0,5% dengan omset 0 – Rp4,8 Miliar

Distribusi akses kredit usaha rakyat (KUR) 7%, 80%nya harus diarahkan ke unit usaha mikro (98,70% dari total unit usaha di Indonesia)

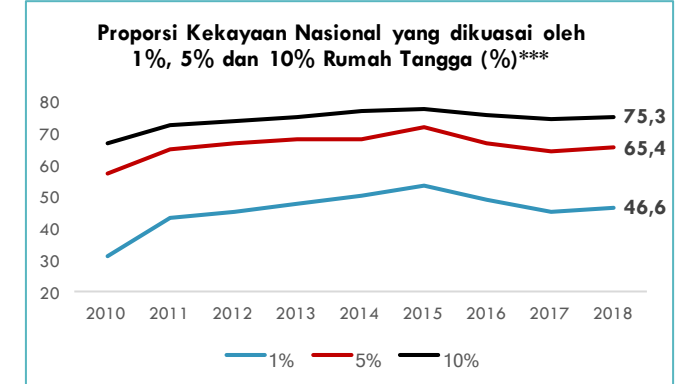
Memperbesar kewajiban kredit perbankan untuk UMKM sebanding dengan kontribusinya terhadap PDB yaitu 60% dan penyerapan tenaga kerja hingga 97%

Problem Struktural

- 1 Pertumbuhan ekonomi melambat
- 2 CAD melebar
- 3 BOP defisit
- 4 Neraca perdagangan defisit
- 5 Inequality masih tinggi
- 6 Job creation terbatas dan tak berkualitas

Gambaran Struktur Pelaku Ekonomi dan Proporsi Kekayaan Nasional di Indonesia Saat Ini

Pelaku ekonomi	Komposisi pelaku*	Serapan tenaga kerja*	Kontribusi thd PDB*	Distribusi pembiayaan Perbankan**
Large Enterprises	0,01%	3%	40%	80%
Micro, Small and Medium Enterprises	99,99%	97%	60%	20%



Telah terjadi ketidakadilan dalam pembagian kue ekonomi

Dengan struktur seperti ini, sejak 2014, Indonesia terjebak dalam pertumbuhan 5%

5% Growth Trap!!!

Sumber:

- * Kementerian Koperasi dan UKM (2017)
- ** Statistik Kredit UMKM, Bank Indonesia
- *** Global Wealth Databook Credit Suisse



KOOPERASI UMKMB

**SEBAGAI STRATEGI KELUAR DARI
JEBAKAN PERTUMBUHAN LIMA PERSEN**

Finding: Dampak Simulasi Mendorong Omset UMKM

Jika pemerintah fokus mendorong kenaikan omset UMKM, dengan target kenaikan omset usaha mikro sebesar **30%**, usaha kecil sekitar **10%** maka perekonomian nasional setidaknya dapat tumbuh **7%**, bahkan mencapai **9%** (yoy).

Kelompok Usaha	Unit Usaha	PDB Harga Berlaku (Rp Triliun)	Rata-rata Omset Per Unit Usaha (Rp Juta)	Simulasi Kenaikan Omset UMKM		
				Kenaikan Omset	Omset Akhir (Rp Juta)	PDB Harga Berlaku (RP Triliun)
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	62,922,617	7,705	122		147	9,246
- Usaha Mikro (UMi)	62,106,900	4,728	76	30%	99	6,146
- Usaha Kecil (UK)	757,090	1,234	1,630	10%	1,793	1,358
- Usaha Menengah (UM)	58,627	1,742	29,721	0%	29,721	1,742
Usaha Besar (UB)	5,460	5,136	940,700	0%	940,700	5,136
Total	62,928,077	12,841	204		229	14,383
Pertumbuhan PDB Nominal				12.0%		
Pertumbuhan PDB Riil				7.0%		

Sumber: Hasil analisis KEIN terhadap data Kementerian KUKM (2017)

Catatan:

Kenaikan rata-rata omset usaha mikro sebesar 30% setara dengan kenaikan omset sekitar Rp 23 juta per tahun atau sebesar Rp 63 ribu rupiah per hari

Definisi Usaha Mikro Kecil dan menengah menurut UU NOMOR 20 TAHUN 2008 tentang USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Mikro : omset per tahun sampai dengan Rp 300 juta

Kecil : omset per tahun lebih dari Rp 300 juta s.d Rp 2.5 Miliar

Menengah : omset per tahun lebih dari Rp 2.5 Miliar s.d Rp 50 Miliar

Finding: Dampak Kenaikan UMKM Naik Kelas terhadap Perekonomian

Hal lain yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong UMKM naik kelas. Jika **10%** saja dari UMKM yang ada mengalami kenaikan kelas, hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional tembus 7%, bahkan mencapai **9,3%** (yoy).

Kelompok Usaha	Unit Usaha	PDB Harga Berlaku (Rp Triliun)	Rata-rata Omset Per Unit Usaha (Rp Juta)	Simulasi Kenaikan UMKM Naik Kelas Sebanyak 10%			
				Jumlah Unit Usaha Pindah Kelas	Jumlah Unit Usaha Akhir	PDB Harga Berlaku (Rp Triliun)	
A.	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	62,922,617	7,705	122	6,292,262	62,916,754	8,987
	- Usaha Mikro (UMi)	62,106,900	4,728	76	6,210,690	55,896,210	4,255
	- Usaha Kecil (UK)	757,090	1,234	1,630	75,709	6,892,071	2,974
	- Usaha Menengah (UM)	58,627	1,742	29,721	5,863	128,473	1,757
B.	Usaha Besar (UB)	5,460	5,136	940,700		11,323	5,429
	Total	62,928,077	12,841	204	6,292,262	62,928,077	14,416
	Pertumbuhan PDB Nominal		12.3%				
	Pertumbuhan PDB Riil		7.3%				

Sumber : Hasil analisis terhadap data Kementerian KUKM (2017)

Finding: Dampak Kenaikan UMKM Naik Kelas terhadap Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan

Upaya peningkatan kapasitas UMKM secara signifikan dapat mendorong tingkat pendapatan rumah tangga masyarakat golongan menengah kebawah dan pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan mempersempit kesenjangan yang terjadi

	Tingkat Kemiskinan (%)		Koefisien Gini	
	Kondisi Awal	Hasil Simulasi	Kondisi Awal	Hasil Simulasi
Perkotaan	7.02	5.49	0.401	0.386
Perdesaan	13.2	10.55	0.324	0.315
Nasional	9.82	7.79	0.389	0.376

Dengan mendorong UMKM naik kelas dapat mengurangi tingkat kemiskinan sekitar **20%** atau setara dengan mengeluarkan 5 juta orang dari kemiskinan. Selain itu, UMKM naik kelas dapat mengurangi ketimpangan sekitar **4%**

Sumber : Hasil Simulasi menggunakan SUSENAS Maret 2018

Keterangan:

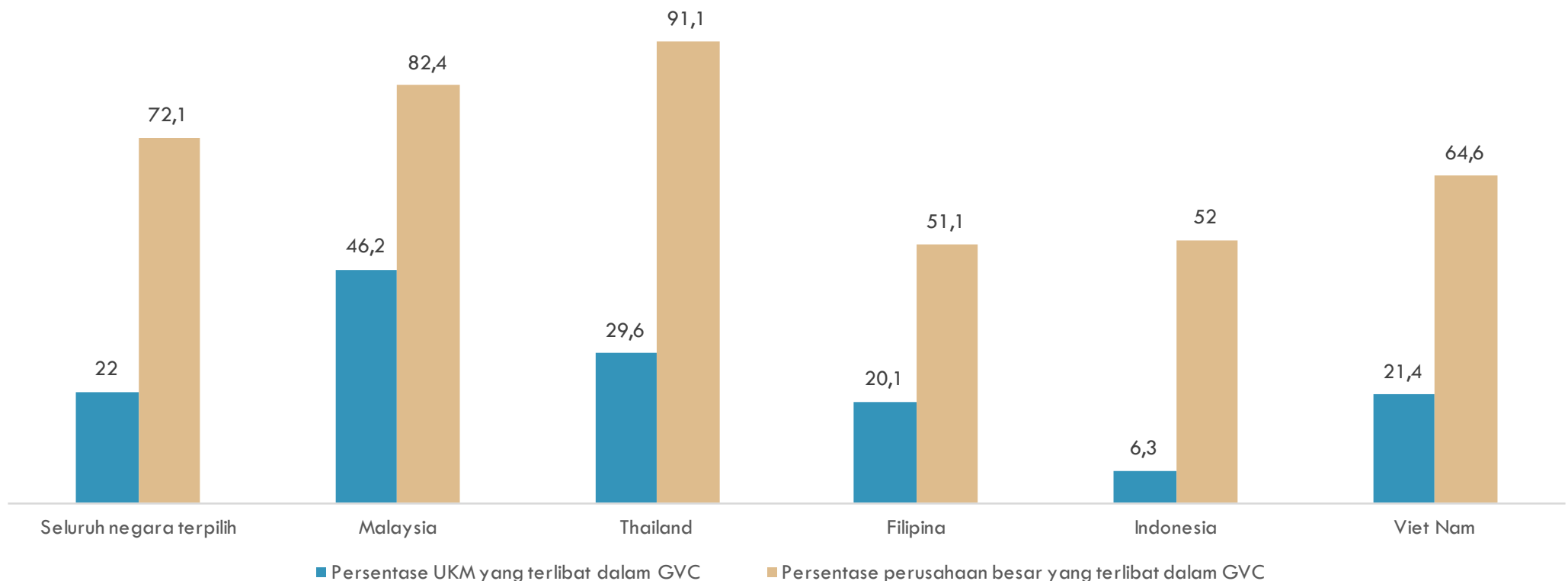
Kondisi Awal : Kondisi Maret 2018

Hasil Simulasi : Simulasi UMKM naik kelas yang mendorong kenaikan pendapatan rumah tangga yang terkait kegiatan UMKM

Fact: Keterlibatan Sektor UKM Indonesia dalam Rantai Nilai Global Masih Sangat Rendah

Dari lima negara terpilih, keterlibatan sektor UKM Indonesia dalam rantai nilai global **paling rendah**. Hanya **6,3 persen** dari total UKM yang ada di Indonesia yang mampu terlibat dalam rantai perdagangan di wilayah Asia Tenggara.

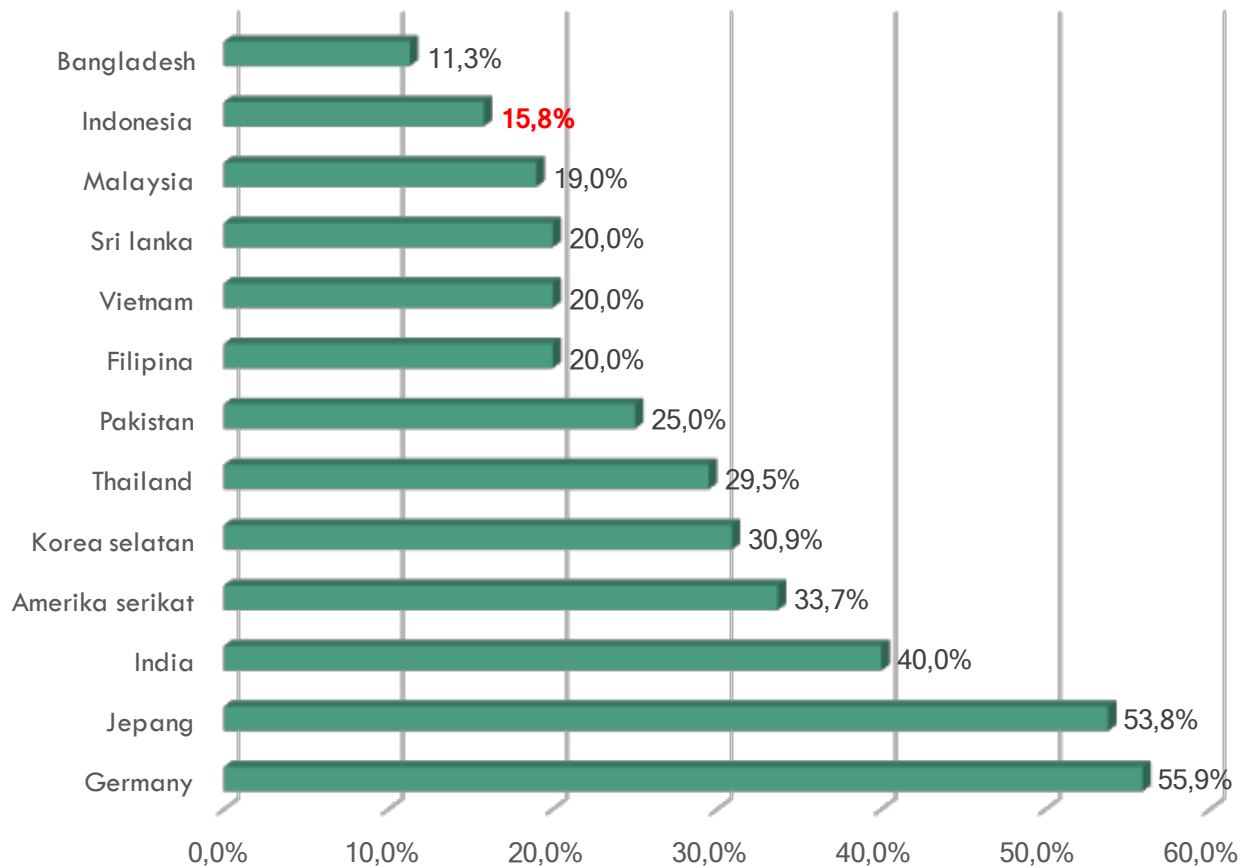
Peran UKM dalam Rantai Nilai Global (GVC) di Wilayah Asia Tenggara



Sumber: Wignaraja, G., (2013), "Can SMEs participate in global production networks", in Elms, D., and Low, P., (ed), Global Value Chains in a Changing World, World Trade Organization: Geneva

Fact: Kontribusi Sektor UMKM terhadap Ekspor Nasional di Indonesia Masih Rendah Dibandingkan Negara Lain

Kontribusi Sektor UMKM terhadap Ekspor Nasional



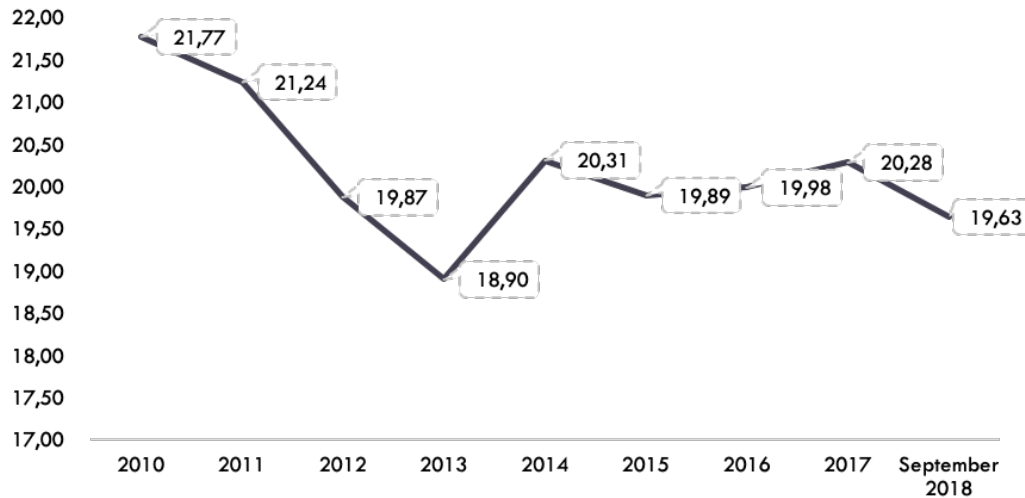
Sumber: Yoshino dan Wignaraja (2015)

Defisit neraca perdagangan yang terjadi pada 2018 menuntut pemerintah untuk melakukan langkah strategis agar kondisi ekonomi nasional lebih stabil. Salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mendorong kegiatan ekspor produk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Namun faktanya, Kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional masih rendah yaitu sebesar **15,8%** atau sekitar US\$23 miliar dari total ekspor nonmigas. Angka tersebut juga lebih rendah dibandingkan dengan negara Asean lainnya seperti Vietnam 20% dan Thailand 29,5%.

Fact: Masih Rendahnya Kucuran Kredit yang Ditujukan untuk Sektor UMKM

Kredit UMKM terhadap Total Kredit Perbankan (%)



Indonesia memiliki sekitar 58 juta unit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), mencapai 99,9% dari total unit usaha yang tersebar di seluruh negeri ini. Ini adalah usaha-usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh para petani, nelayan, perempuan di pelosok daerah, tukang sayur di pasar tradisional dan semacamnya. Banyak diantara mereka yang belum memiliki akses ke pinjaman bank.

Terkonsentrasinya pelaku ekonomi di sektor ini tidak serta merta diikuti dengan kucuran kredit yang mencukupi. Dari Rp5.300 triliun total kredit yang dikucurkan oleh bank umum di Indonesia tahun lalu, kurang dari **20 persen** atau sekitar Rp1.000 triliun saja yang ditujukan bagi UMKM.

Pemberian kredit masih **didominasi oleh Bank Umum Nasional**, yang memang telah diinstruksikan oleh Pemerintah untuk lebih memperhatikan UMKM melalui instrumen kebijakan ekonomi “Paket 4”. Perbankan lain, **terutama Bank Asing** perlu didorong untuk berpartisipasi aktif dalam pemberian permodalan bagi UMKM dan mempermudah proses administrasinya agar UMKM mampu meningkatkan kapasitas usahanya.

Sumber: Statistik Kredit UMKM, Bank Indonesia (diolah), data per September 2018; <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150512151359-78-52811/50-juta-umkm-masuk-daftar-negatif-kredit-perbankan?>

Keterangan	Penyaluran Kredit UMKM (Miliar Rp)	Persentase
Bank Persero (BUMN)	536,924.30	51.7%
Bank Swasta Nasional Devisa	318,208.60	30.7%
Bank Swasta Nasional Non Devisa	46,526.50	4.5%
BPD	75,872.10	7.3%
Bank Campuran	6,686.70	0.6%
Bank Asing	967.2	0.1%
BPR-BPRS	52,433.80	5.1%
Total	1,037,619.10	100%

Moving Forwards

Kebijakan Perpajakan

- Tarif pajak tidak dapat disamaratakan antara usaha kecil, mikro dan menengah. Ada threshold bagi UMKM yang tidak perlu dikenai pajak. Rentang omzet unit usaha yang wajib dikenakan pajak UMKM adalah : **Rp1,1 Miliar – Rp4,8 Miliar**.
- Unit usaha mikro tidak boleh ada yang dikenai pajak
- Ekstensifikasi pajak melalui pemberian NPWP secara cuma-cuma dan sistem jemput bola bagi seluruh UMKM yang ada di Indonesia.

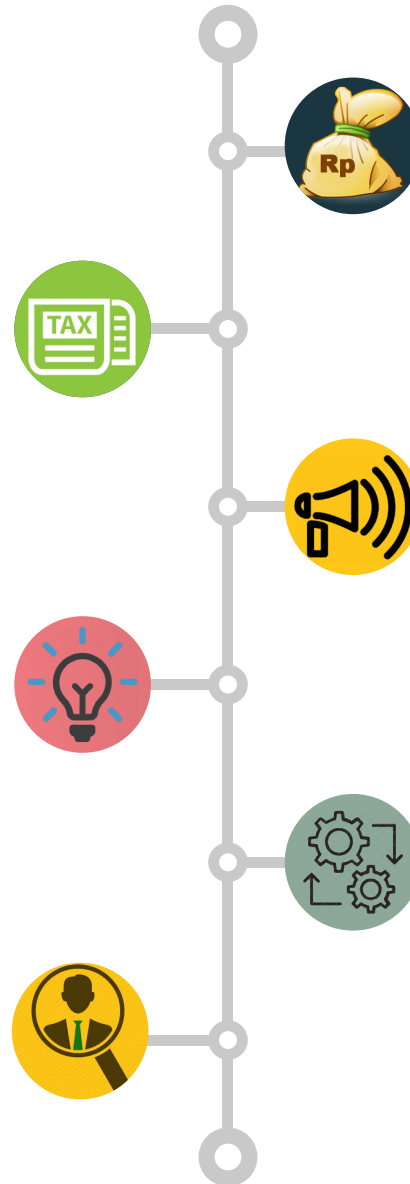
Kebijakan Inovasi

- Menerapkan berbagai **skema insentif** bagi UMKM untuk mendorong penciptaan inovasi produk dan teknologi yang lebih baik, seperti **R&D tax incentive dan dana hibah/grants**

Kebijakan Sumber Daya Manusia

- Dalam rangka meningkatkan skill TK di sektor UMKM, Pemerintah perlu menerapkan berbagai skema mengumpulkan budget utk pelaksanaan keg. pendidikan dan pelatihan.
- Salah satu strategi yang banyak diadopsi oleh berbagai negara adalah **training levies** yang membebankan iuran/potong dari total upah yg harus dibayarkan oleh setiap usaha dengan besaran berbeda2 di setiap negara. Iuran tsb akan diserahkan kpd lembaga pelatihan nasional utk memobilisasi kegiatan pelatihan utk seluruh TK.

Artif Budimanta



Kebijakan Finansial

- Meningkatkan skema dan penyaluran pembiayaan untuk mendorong UMKM berkembang dan berinovasi melalui **venture capital firms** dan melalui kerjasama modal usaha (**venture capital partnerships**)
- Skema pembiayaan harus fleksibel dan variatif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi UMKM

Kebijakan Pemasaran

- Mengusulkan **UU promosi sub-kontrak (Sub-Contracting Promotion Act)** untuk mencegah praktik penyimpangan yang dilakukan perusahaan besar seperti menunda atau mengurangi pembayaran atas kerjasama yang dilakukan dengan UMKM
- Menetapkan skema “Jual Lepas” agar perputaran uang dalam usaha UMKM terus terjadi (dengan tetap menggunakan merk dagang UMKM)

Kebijakan Sumber Daya

- Melarang masuknya perusahaan besar untuk **sektor usaha-sektor usaha** yang layak untuk di garap UMKM

Benchmarking



JEPANG



Kontribusi UKM Terhadap Perekonomian

- Jumlah UKM di Jepang mencapai **99,7%** dari total unit usaha di Jepang dan menyerap tenaga kerja hingga **70,2%** dari total orang yang bekerja.
- Kontribusi sektor UKM mencapai **50%** terhadap PDB nasional dan **54%** terhadap ekspor nasional.

Strategi kebijakan

- Pemerintah Jepang berupaya mengurangi konflik yang terjadi antara pelaku usaha besar dan pelaku UKM serta **menindak tegas** thd setiap praktik-praktik persaingan tidak sehat yang dapat mematikan UKM. Pemerintah juga mendorong kerjasama antara perusahaan skala besar dan UKM melalui skema linkages.
- **UU promosi sub-kontrak (Sub-Contracting Promotion Act)** disahkan untuk mencegah penyalahgunaan yang dilakukan perusahaan besar seperti menunda atau mengurangi pembayaran atas kerjasama yang dilakukan dengan UKM.
- Pemerintah Jepang **melarang masuknya perusahaan besar untuk sektor usaha-sektor usaha** yang dirasa cocok untuk di garap UKM.

Program kebijakan

- **Dari sisi pembiayaan**, pemerintah membangun berbagai skema untuk membantu masalah pembiayaan, termasuk melalui **pembiayaan langsung (direct financing)**.
- **Center of Excellence (CoE)**, tempat bagi UMKM untuk **berkonsultasi** thd setiap permasalahan yang dihadapi, dibangun di setiap daerah di Jepang. CoE menjadi konsultan bagi industri dan perusahaan lokal untuk mengupgrade teknologi yang digunakan, memperbaiki manajemen tata kelola, quality control produk, hingga melatih tenaga kerja.

Sumber:

1. Zhu Xueyi & Fang Cunhao, China Institute for Science and Technology Policy, School of Public Policy and Management Tsinghua
2. Yoshino dan Wignaraja, 2015
3. Intarakumnerd, P. and Goto, A., (2016), "Technology and Innovation Policies for SMEs in East Asia", in Vandenberg, P., et al., (ed), SMEs in Developing Asia: New Approaches to Overcoming Market Failures, Asian Development Bank Institute: Tokyo



KOREA



Kontribusi UKM Terhadap Perekonomian

- Jumlah UKM di Korea mencapai **99,2%** dari total unit usaha di Korea dan menyerap tenaga kerja hingga **87,5%** dari total orang yang bekerja.
- Kontribusi sektor UKM mencapai **49%** terhadap PDB nasional dan **31%** terhadap ekspor nasional.

Strategi kebijakan

PEMBIAYAAN

- Di tahun 2006, pemerintah menginisiasi 102 perusahaan pembiayaan khusus untuk UKM (**venture capital firms**) dan 366 kerjasama modal usaha (**venture capital partnerships**). Sedangkan untuk pembiayaan tidak langsung, pemerintah memberikan program kredit khusus bagi UKM yang tidak memenuhi syarat untuk pinjaman bank karena kurangnya jaminan.

PENCIPTAAN INOVASI

- Pemerintah Korea aktif **mencari UKM yang sukses** menghasilkan inovasi produk yang belum ada di market serta memiliki kelebihan dibandingkan produk sebelumnya. Misalnya, produk yang dihasilkan dapat mengurangi penggunaan energi, mengurangi emisi atau memiliki performa yang lebih unggul. Agar inovasi tsb dapat diterima oleh market, pemerintah menerapkan berbagai skema, diantaranya: labelling, market promotion hingga pemberian insentif bagi pelaku ekonomi yang mau menerapkan inovasi tsb.

Sumber:

1. Zhu Xueyi & Fang Cunhao, China Institute for Science and Technology Policy, School of Public Policy and Management Tsinghua
2. Yoshino dan Wignaraja, 2015
3. Joo-Yong Kim, Director of the APEC SME innovation Center in TIPA, Korea

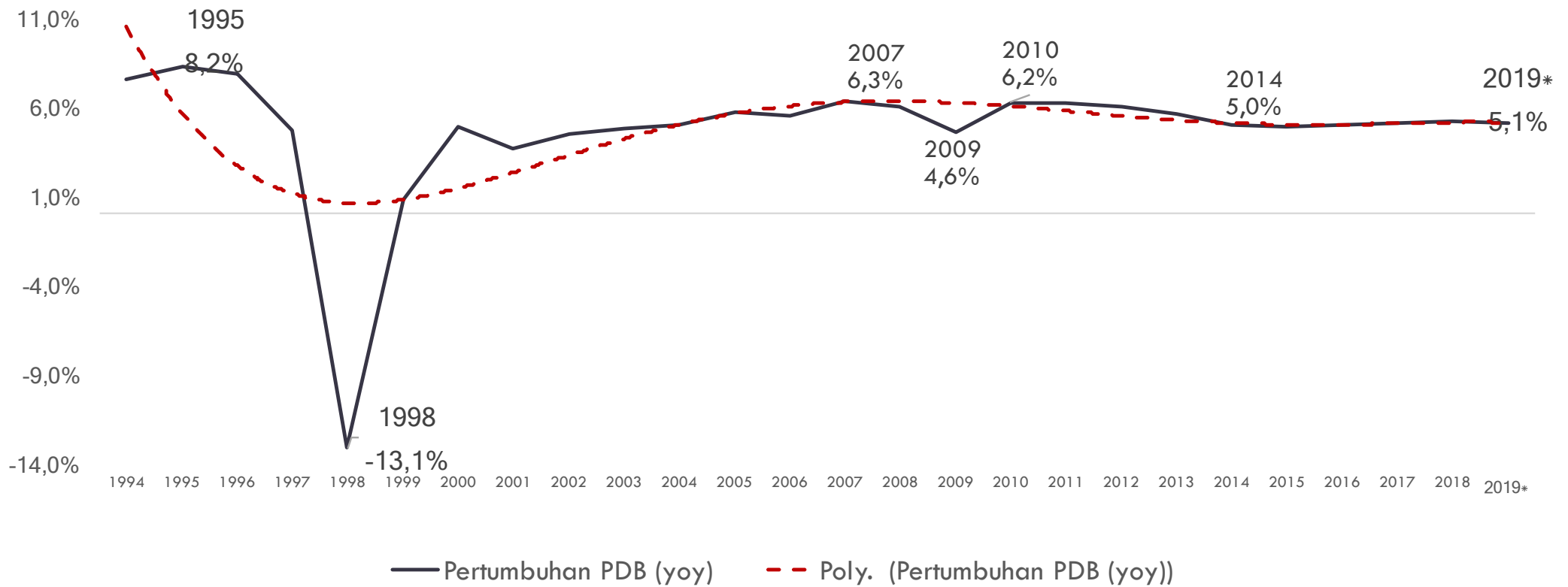


LAMPIRAN

1

Tren pertumbuhan PDB melambat dan cenderung stagnan di angka lima persen sejak 2014

Pertumbuhan PDB (yoy)

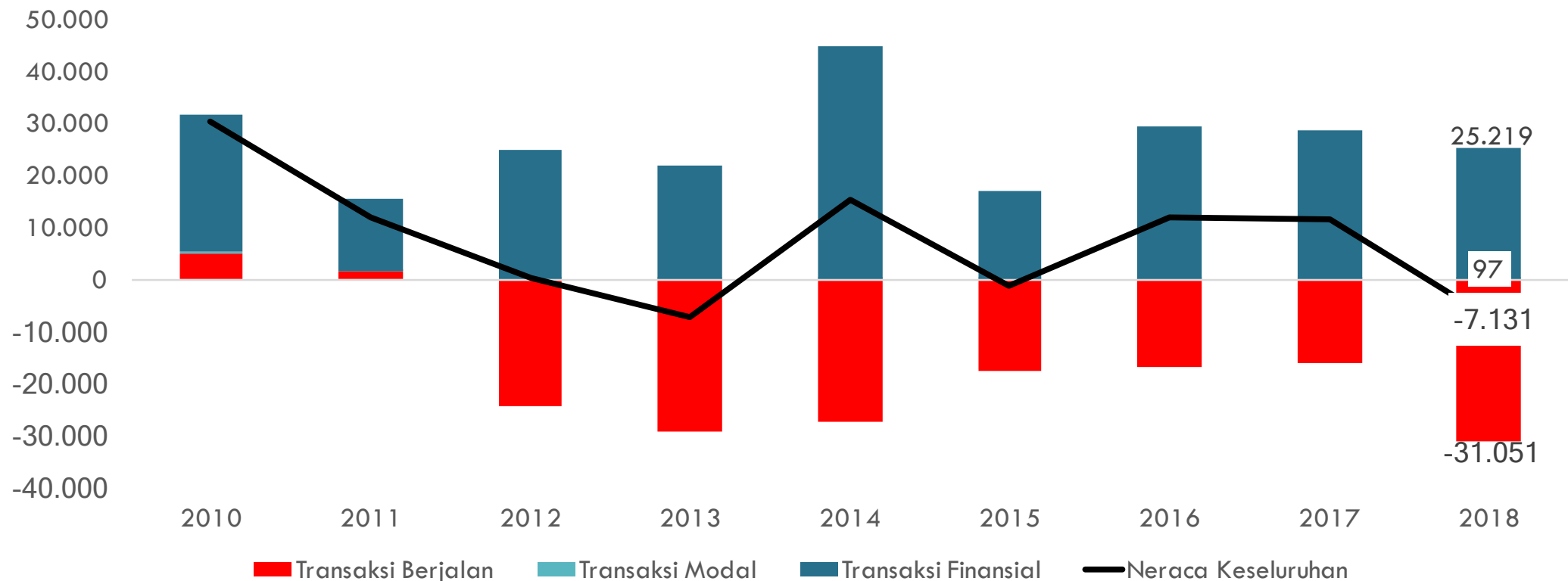


* Pertumbuhan 2019 merupakan pertumbuhan yoy Triwulan I
 Sumber: BPS

2 Defisit neraca pembayaran Indonesia

Tahun 2018, neraca pembayaran Indonesia mengalami defisit yang cukup dalam setelah mengalami perbaikan pada dua periode sebelumnya. Kondisi ini didorong oleh semakin melebarnya defisit transaksi berjalan serta menurunnya kinerja transaksi finansial. Secara keseluruhan, neraca pembayaran Indonesia tercatat defisit sebesar **USD7,1 miliar** pada tahun 2018.

Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia (Juta USD)

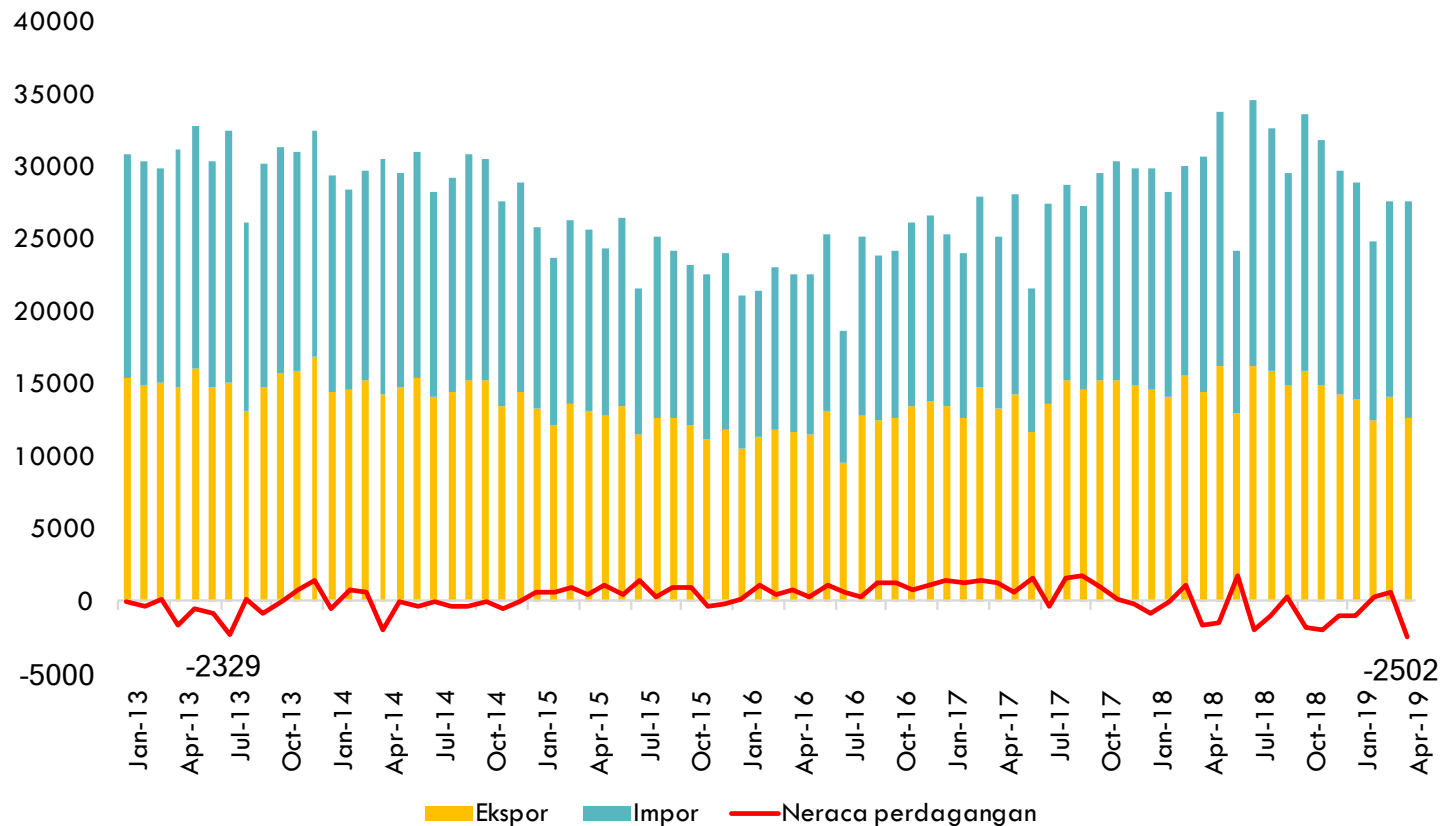


3

Defisit neraca perdagangan Indonesia

Pada April 2019, defisit perdagangan Indonesia mencapai USD2,5 miliar, merupakan **defisit terdalam** setelah defisit sebesar USD2,3 miliar pada Juli 2013.

Neraca Perdagangan Indonesia (Juta USD)

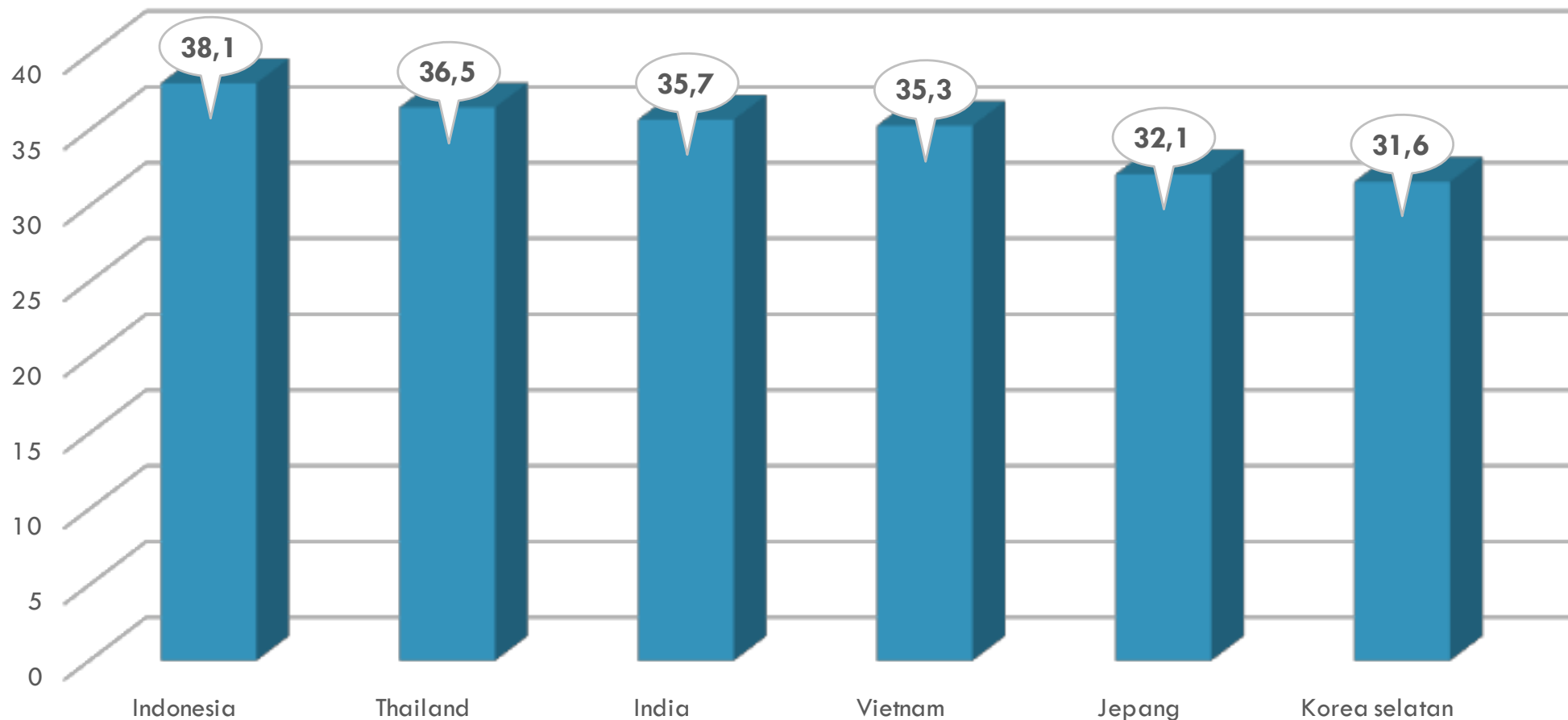


Defisit terjadi disebabkan merosotnya ekspor nonmigas diiringi dengan impor yang tinggi. Pada April 2019, ekspor tercatat sebesar **USD 12,6 miliar**, sementara impor tercatat sebesar **USD 15,1 miliar**.

4

Tingkat ketimpangan di Indonesia masih cukup tinggi dibandingkan negara lain

Perbandingan Koefisien Gini di Beberapa Negara



Ket :

Indonesia dan Thailand menggunakan data terupdate tahun 2017

Vietnam menggunakan data terupdate tahun 2016

Korea Selatan menggunakan data terupdate tahun 2012

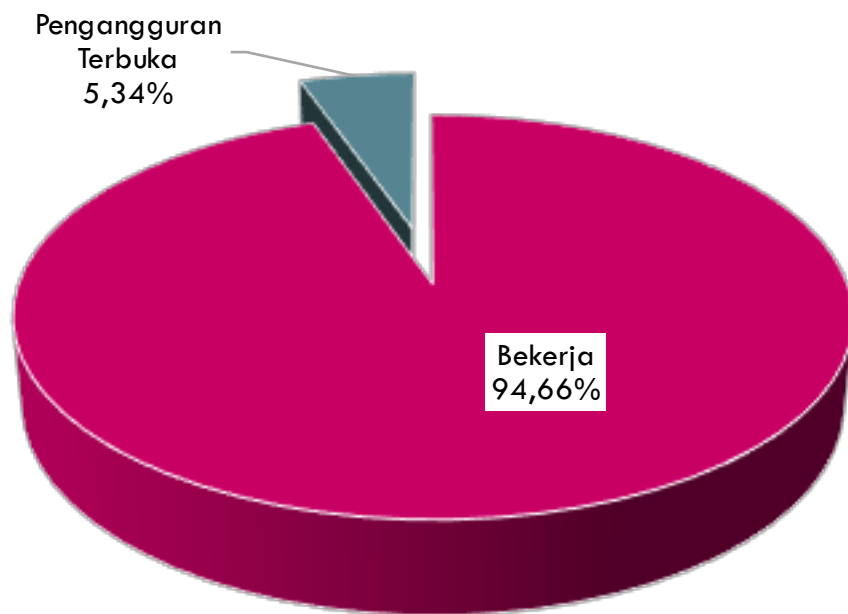
India menggunakan data terupdate tahun 2011

Jepang menggunakan data terupdate tahun 2008

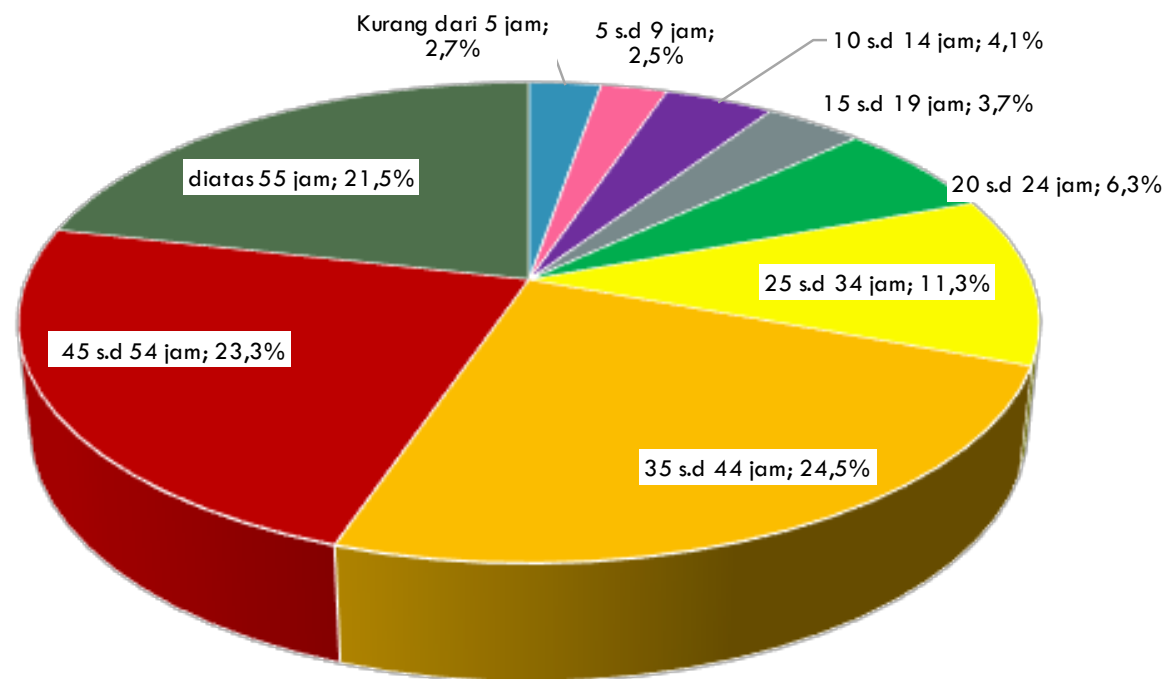
Sumber: Bank Dunia

5 Kurang dari setengah pekerja di Indonesia bekerja di atas 45 jam dalam seminggu

Kondisi Angkatan Kerja Indonesia (Agustus 2018)



Komposisi Penduduk yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Jumlah Jam Kerja (Agustus 2018)



Sumber: BPS

Kebijakan UMKM Indonesia: Sebuah Ulasan

	Kebijakan saat ini	Yang perlu ditindaklanjuti
Konsep Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan UMKM seringkali merupakan tindakan koreksi terhadap kebijakan lain yang berdampak merugikan usaha kecil, sehingga sifatnya adalah tambal-sulam • Terdapat kesenjangan antara kebijakan UMKM dengan pelaksanaan program di lapangan • Terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang justru kontra-produktif terhadap penguatan dan pemberdayaan UMKM • Kebijakan UMKM masih bersifat umum dan tidak terukur 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Perubahan paradigma pemberdayaan UMKM ke arah penguatan kemandirian UMKM sebagai penopang ekonomi nasional, sumber inovasi dan <i>entepreneurship</i> serta sumber penciptaan lapangan pekerjaan dan pendapatan bagi 97% tenaga kerja Indonesia <input type="checkbox"/> Perlu adanya monitoring dan evaluasi untuk melakukan pengukuran mengenai efektivitas beragam program pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM <input type="checkbox"/> Perlu adanya insentif dan penghargaan dalam implementasi kebijakan UMKM, baik di level nasional maupun daerah
Institusi kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan UMKM di Indonesia berada di bawah tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKUKM) • Terdapat instansi lain yang juga melaksanakan fungsi pengembangan UMKM sesuai dengan wewenang masing-masing • Koordinasi dan sinergi yang lemah antara satu program terkait UMKM yang dikelola satu lembaga pemerintah dengan program yang dikelola lembaga pemerintah lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Penguatan koordinasi dan sinergi antarlembaga dan antarprogram bagi UMKM
Kebijakan finansial	<ul style="list-style-type: none"> • Kredit program untuk UMKM, seperti KUR dan KUBE belum sepenuhnya disalurkan kepada UMKM yang berhak • Pengajuan KUR dan KUBE oleh UMKM tidak mudah dan terkendala secara administratif • Kebijakan suku bunga 7% bagi UMKM belum dilaksanakan secara merata oleh institusi keuangan • Program pembiayaan UMKM yang tumpang tindih • Lembaga penjamin kredit bagi UMKM belum berjalan efektif 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Perlu adanya monitoring dan evaluasi dalam program penyaluran pembiayaan bagi UMKM, baik KUR, KUBE, dana bergulir, dsb <input type="checkbox"/> Skema pembiayaan harus fleksibel dan variatif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi UMKM <input type="checkbox"/> Optimalisasi peran fintech dalam pembiayaan UMKM <input type="checkbox"/> Perlu adanya satu lembaga keuangan yang independen yang berorientasi pada pemberdayaan dan penguatan UMKM <input type="checkbox"/> Mengikutsertakan institusi keuangan dalam kompetisi <i>Global SME Finance Awards</i> sebagai dorongan dan insentif untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM

Kebijakan UMKM Indonesia: Sebuah Ulasan

	Kebijakan saat ini	Yang perlu ditindaklanjuti
Kebijakan perpajakan	<p>Pengenaan tarif PPh Final UMKM 0,5 persen berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp 4,8 miliar dalam setahun</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Kebijakan ini tidak dapat disamaratakan antara usaha kecil, mikro dan menengah. <ul style="list-style-type: none"> • Harus ada perbedaan <i>threshold</i> besaran omzet UMKM yang tidak perlu dikenai pajak sesuai dengan skala usaha UMKM. Hal ini dapat mengacu pada aturan PTKP dimana penghasilan dengan Rp54 juta per tahun tidak dikenai pajak. • Bagi unit usaha yang telah melebihi <i>threshold</i> tersebut, dapat dikenakan pajak progresif. ❑ Simulasi batas minimum UMKM tidak kena pajak Asumsi: <ul style="list-style-type: none"> • profit 5% dari omzet • besaran profit suatu unit usaha sama dengan batas PTKP Batas PTKP= Rp54 juta/tahun Maka, Rp54 juta / omzet= 5%, Berarti omzet=(Rp54 juta/5)*100 Sehingga, sekitar Rp1,1 Miliar adalah omzet yang tidak dikenai pajak. Implikasinya, sebagian usaha kecil ada yg dikenai pajak. Sedangkan usaha mikro seharusnya tidak ada yang dikenai pajak. ❑ Pengenaan tarif PPh Final UMKM seharusnya didasarkan pada profit bukan didasarkan pada omzet. Karena di dalam omzet masih mengandung unsur risiko dan biaya.
Kebijakan industri	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur UMKM di Indonesia yang lebih banyak bergerak di sektor makanan dan minuman serta perdagangan yang cenderung memiliki nilai tambah yang rendah 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Sistem insentif bagi pengembangan industri masih cenderung berorientasi pada industri skala besar

Kebijakan UMKM Indonesia: Sebuah Ulasan

	Kebijakan saat ini	Yang perlu ditindaklanjuti
Kebijakan pemasaran dan perdagangan	<p>Mempertemukan usaha UMKM dengan ritel modern dan <i>marketplace</i>, serta mengikutsertakan UMKM dalam berbagai pameran</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Review kembali struktur dan pola kerjasama antara UMKM dengan ritel modern sehingga tidak merugikan kedua pihak (kurang bayar/telat bayar) <input type="checkbox"/> Pelaku UMKM umumnya ingin kerjasama dengan ritel modern mengikuti skema jual lepas agar perputaran uang dalam usahanya terus terjadi (dengan tetap menggunakan merk dagang UMKM) <input type="checkbox"/> Ritel modern diajak untuk ikut serta memberikan pelatihan standardisasi produk UMKM agar tidak kalah dengan produk asal industri/perusahaan besar <input type="checkbox"/> Optimalisasi pemanfaatan platform <i>e-commerce</i> dan media sosial untuk perluasan pasar produk UMKM
Kebijakan penelitian dan pengembangan teknologi dan inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada kebijakan yang secara spesifik menginkorporasi pengembangan teknologi dan inovasi di dalam kebijakan UMKM • Peran pelaku usaha besar masih terbatas dalam mendorong pengembangan teknologi dan inovasi bagi UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> UMKM yang inovatif dan berteknologi tinggi harus menerima lebih banyak insentif finansial dan insentif teknologi dibandingkan UMKM lainnya <input type="checkbox"/> Pemberian insentif, baik fiskal maupun moneter, bagi pelaku usaha besar untuk mendorong transfer teknologi kepada UMKM, terutama dalam penerapan standardisasi dan pengendalian mutu produk UMKM <input type="checkbox"/> Mengadakan <i>Indonesia's SME Excellence Awards</i> atau UMKM Juara, dimana inovasi dan teknologi merupakan komponen penilaian <input type="checkbox"/> Mengikutsertakan pelaku UMKM dalam kompetisi <i>SME Awards</i> dan <i>SME International Honor Awards</i> sebagai dorongan dan insentif untuk melakukan inovasi
Kebijakan sumber daya manusia	<p>Peningkatan kualitas SDM UMKM yang sudah dilakukan saat ini masih terbatas pada bimbingan teknis manajemen sumber daya manusia dan bimbingan teknis pelaku usaha</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Jenis usaha UMKM yang berbeda-beda tentu memerlukan pendidikan dan pelatihan yang berbeda. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan perlu disesuaikan dengan kebutuhan UMKM terkait <input type="checkbox"/> Pendidikan dan pelatihan terutama diperuntukkan dalam rangka pengembangan teknologi dan inovasi terkait standardisasi dan pengendalian mutu produk UMKM



Dr. Arif Budimanta

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional
Republik Indonesia

Arif Budimanta menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Universitas Indonesia, kemudian mengambil studi mengenai keuangan di University of Chicago serta mengikuti Senior Executive Program di Harvard Business School, Harvard University dan ASEAN-ROK Next Generation Opinion Leaders Program yang diselenggarakan oleh The Korea Foundation pada 2015. Selain menjabat sebagai wakil ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional, saat ini ia juga menjabat sebagai anggota Dewan Direktur Indonesia Eximbank, wakil ketua Lembaga Pengkajian MPR RI serta ketua Dewan Pengurus Megawati Institute.

Di sela-sela kesibukannya, ia aktif sebagai pengajar pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Arif merupakan pendiri dan penasihat senior bagi Indonesia Center for Sustainable Development (ICSD). Ia juga termasuk kedalam anggota dari Royal Economic Society (RES) London. Pada periode 2009-2014, Arif Budimanta terpilih sebagai Anggota DPR RI dan ditugaskan di Komisi XI yang membidangi Perencanaan Pembangunan, Keuangan dan